

BAB II

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Pengungkapan Sukarela

Mujiono dan Nany (2010) mendefinisikan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan melebihi dari apa yang diwajibkan untuk diungkapkan.

Pengungkapan sukarela merupakan bebas pilihan manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan dalam pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan (Botosan, 1997). Pertimbangan manajemen untuk mengungkapkan informasi secara sukarela dipengaruhi oleh faktor biaya dan manfaat. Manfaat utama yang diperoleh perusahaan dari pengungkapan sukarela adalah biaya modal yang rendah sehingga manajemen akan mengungkapkan informasi secara sukarela jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biayanya (Nugrahani & Nugroho, 2010).

Informasi merupakan sinyal bagi para investor dalam memberikan prospek perusahaan yang bersangkutan. Tersedianya informasi yang benar-benar dapat dipercaya, lengkap, dan tepat waktu akan memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan investasi secara rasional, sehingga yang diperoleh sesuai dengan harapan yang diinginkan investor (Hardiningsih, 2008). Teori signal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal.

Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Manajer perusahaan memiliki pengetahuan lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pihak eksternal. Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan

menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan.

Pihak eksternal yang tidak memiliki informasi akan berpersepsi sama tentang nilai semua perusahaan. Pandangan seperti ini akan merugikan perusahaan yang memiliki kondisi yang lebih baik karena pihak eksternal akan menilai perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya, sebaliknya akan menguntungkan bagi perusahaan yang kondisinya buruk karena pihak eksternal menilai lebih tinggi dari yang seharusnya. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara mengurangi asimetri informasi.

Salah satu indikator yang mempengaruhi pengungkapan sukarela adalah tata kelola perusahaan. Peraturan Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-06/PM/2000 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik mendorong terciptanya tata kelola perusahaan juga. Pelaksanaan tata kelola perusahaan juga merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pemilik karena menunjukkan transparansi perusahaan yang dilakukan dengan mengungkapkan laporan keuangan yang merupakan sarana komunikasi antara pengelola dengan pemilik (Nugrahani & Nugroho, 2010).

Tata kelola perusahaan juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Tata kelola perusahaan yang baik akan memperkuat prosedur pengendalian internal perusahaan dan memastikan pengungkapan yang tepat waktu, akurat, dan komprehensif dari semua hal yang material termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata

kelola perusahaan (Ramadhan, 2014). Tata kelola perusahaan perusahaan memberikan sinyal kepada pihak luar yang dapat berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan pada masa yang akan datang dengan melalui pengungkapan sukarela.

2.2 Tata Kelola Perusahaan

Peran penting tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan laporan keuangan tidak diperhatikan oleh pihak manajemen pada tahun 1990-an di seluruh dunia. Seiring sejumlah perusahaan bangkrut pada awal tahun 2000 pada negara maju dan berkembang, peneliti mulai tertarik untuk meneliti mekanisme tata kelola perusahaan dan kontribusinya terhadap perusahaan (Zanani, Shahanaz, & Nurasyikan, 2008). Banyak teori seperti teori keagenan dan banyak perusahaan pedoman saling setuju bahwa memiliki sistem tata kelola perusahaan yang baik akan memperkuat prosedur pengendalian internal perusahaan dan akan meningkatkan pengungkapan informasi tentang kinerja korporasi.

Tata kelola perusahaan terdiri dari hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan, pihak auditor, dan pihak kepentingan lainnya yang memastikan dibentuknya sistem kontrol untuk menghargai hak pemegang saham minoritas dan benar melaksanakan resolusi prakitan (Salteh, Nahandi, & Khoshbakht, 2011). Karakteristik tata kelola perusahaan dapat digunakan untuk meminimalkan konflik keagenan dengan dijadikan *proxy* independen sehingga menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham (Eng & Mak, 2003).

Pengungkapan dan transparansi dianggap menjadi salah satu elemen yang paling penting dari tata kelola perusahaan yang baik, sehingga untuk mendirikan struktur tata kelola perusahaan yang baik, telah mengharuskan perlunya perbaikan dalam pengungkapan informasi keuangan (Janadi, Rahman & Omar, 2013). Tata kelola perusahaan yang sempurna dapat menguatkan pengendalian intra-perusahaan, mengurangi tindakan oportunistik dan menurunkan asimetri informasi, sehingga tata kelola perusahaan memiliki pengaruh positif pada tingginya kualitas informasi yang diungkap (Siagian & Ghodzali, 2012).

Tata kelola perusahaan menjadi hal yang penting bagi pemerintah Indonesia untuk diterapkan oleh perusahaan. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002 pada tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN diwajibkan menjadikan prinsip pada tata kelola perusahaan yang baik sebagai landasan operasional kegiatan usaha.

2.3 Model Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengungkapan sukarela telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu diberbagai negara. Penelitian tersebut diantaranya yang dilakukan oleh Yuen, Liu, Zhang, dan Lu (2009), Lan, Wang, dan Zhang (2013) di China, Mujiono dan Nany (2006), Hardiningsih (2008) dan Wardani (2012) di Indonesia. Alhazaimh, Palaniappan dan Almsafir (2013), Sartawi, Hindawi, Bsoul, dan Jamil (2014), Barako (2007) di Kenyan, Ibrahim (2014) di Nigeria, Hossain dan Hammami (2009) di Qatar, Chakroun dan Matoussi (2012), Dhouibi

dan Mamoghli (2013), Ali (2014), Jouirou dan Chenguel (2014) di Tunisia, Hieu dan Lan (2015) di Vietnam.

Ada beberapa studi pendahulu yang meneliti kaitan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan sukarela di antara lain Rouf (2010), Saha dan Akter (2013) di Bangladesh, Siagian dan Ghozhali (2012) di Indonesia, Khodadadi, Khazami dan Alfatooni (2010) di Iran, Albawwat dan Basah (2015) dan Mardini (2015) di Jordania, Akhtaruddin, Hossain, Hossain, Yao (2009) dan Htay (2012) di Malaysia, Damagum dan Chima (2013) di Nigeria, Barros (2013) di Perancis, Janadi *et al.* (2013) di Saudi Arabia, Fathi (2013) di Tunisia. Ada beberapa penelitian yang meneliti pengungkapan sukarela diluar konsep tata kelola perusahaan, diantaranya yang diteliti oleh Uyar, Kilic dan Bayyur (2013), Soliman (2013), Ibrahim (2014), Kaya (2014), Sartawi *et al.* (2014), Albitar (2015) yang meneliti pengungkapan sukarela dengan menggunakan konsep karakteristik perusahaan.

Mujiyono dan Nany (2006) meneliti pengaruh *leverage*, likuiditas, dan saham publik terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2002 yaitu sejumlah 273 perusahaan. Penelitian tersebut dengan tujuan memberikan bukti empiris tentang *leverage*, likuiditas, dan saham publik dapat mempengaruhi pengungkapan sukarela secara parsial dan simultan.

Barako (2007) meneliti hubungan tata kelola perusahaan dan pengungkapan sukarela pada perusahaan yang terdaftar di Kenya. Penelitian tersebut menggunakan sampel 54 perusahaan yang terdaftar di *Nairobi Stock Exchange (NSE)* selama periode 1992-2001. Dua belas variabel independen yang

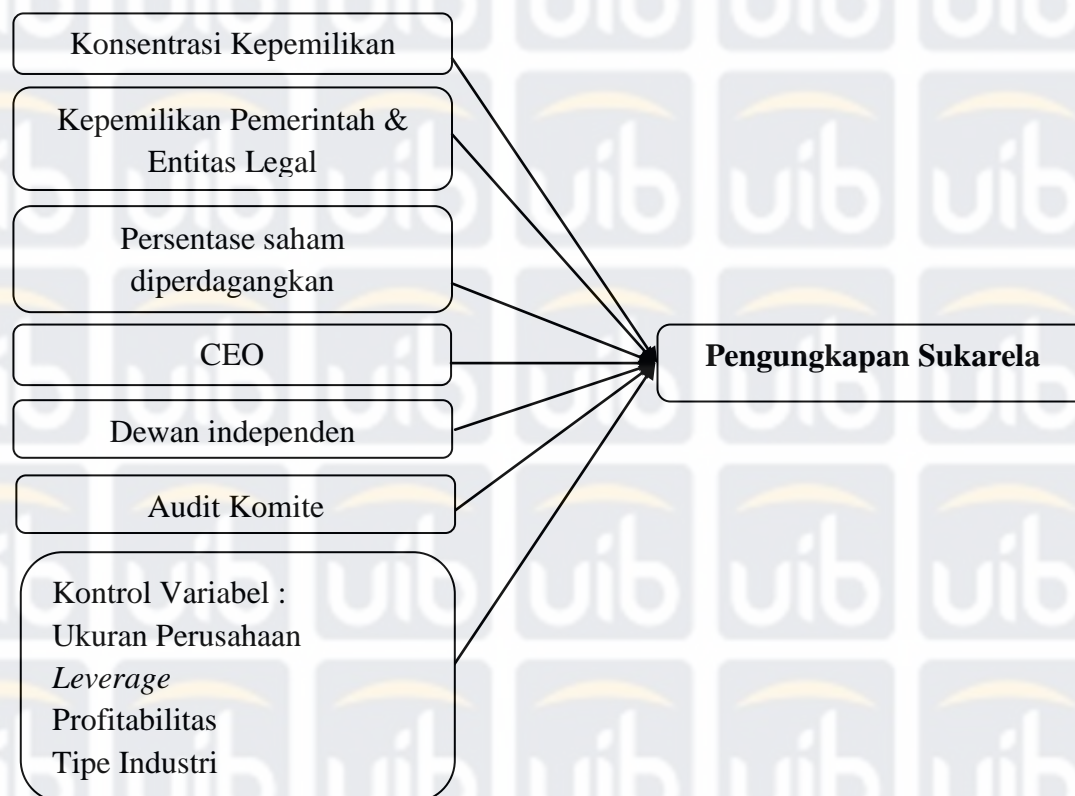
digunakan dalam penelitian yaitu komposisi dewan, struktur kepemimpinan dewan, ukuran dewan, dewan komite audit, konsentrasi pemegang saham, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *leverage*, perusahaan audit eksternal, profitabilitas, likuiditas. Penelitian tersebut juga menggunakan variabel kontrol yaitu tipe industri.

Hardiningsih (2008) meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta. Penelitian tersebut menggunakan sampel 66 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (*BEJ*) selama periode 2004-2005. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu kepemilikan saham oleh publik, perusahaan berbasis asing, ROI, ukuran perusahaan, *leverage*.

Peneliti selanjutnya Akhtaruddin *et al.* (2009) meneliti hubungan tata kelola perusahaan dan pengungkapan sukarela pada perusahaan yang terdaftar di Malaysia. Penelitian tersebut menggunakan 105 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2002. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran dewan, independen direktur non-eksekutif, struktur kepemilikan, *family* kontrol, komite audit.

Yuen *et al.* (2009) meneliti faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela pada perusahaan yang terdaftar di China. Penelitian ini menggunakan sampel 200 perusahaan yang terdaftar di Shanghai Exchange Stock pada tahun 2005. Variabel independen yang diuji adalah konsentrasi kepemilikan, kepemilikan pemerintah dan entitas legal, persentase saham diperdagangkan, *chief executive officer* (CEO), dewan direksi independen, komite audit. Adapun

variabel kontrol yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, tipe industri .



Gambar 1 Model faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela sumber: Yuen *et al.* (2009).

Rouf (2010) meneliti tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada perusahaan yang terdaftar di Bangladesh. Penelitian tersebut menggunakan 120 sampel perusahaan yang terdaftar di Dhaka Stock Exchange (DSE) pada tahun 2008. Variabel independen yang diuji yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, independen dewan non eksekutif, komite audit, dewan struktur kepemimpinan, ukuran dewan, struktur kepemimpinan.

Khodadadi *et al.* (2010) meneliti tentang efek tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan sukarela di Iran. Penelitian tersebut menggunakan 106 perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange pada tahun 2001-2005.

Variabel independen yang diuji yaitu independen dewan direksi, tanggung jawaban *Chairman* dan *CEO*, pemegang saham institusional, ukuran perusahaan, dan tipe auditor.

Siagian dan Ghozhali (2012) meneliti tentang pengaruh struktur dan aktivitas tata kelola perusahaan terhadap luas pengungkapan informasi strategis secara sukarela pada *website* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 yaitu sejumlah 126 perusahaan yang memiliki *website*. Variabel independen yang diuji yaitu ukuran dewan komisaris, aktivitas dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, aktivitas komite audit, aktivitas komite audit, jenis industri.

Soliman (2013) meneliti hubungan karakteristik perusahaan dan tingkat pengungkapan sukarela di laporan tahunan pada perusahaan yang terdaftar di Mesir. Penelitian tersebut menggunakan 50 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Mesir pada tahun 2007-2010. Variabel independen yang diuji adalah ukuran perusahaan, ukuran auditor, profitabilitas, umur perusahaan.

Penelitian selanjutnya pada tahun yang sama yaitu diteliti oleh Sweiti dan Attayah (2013) tentang faktor penting yang mempengaruhi pengungkapan sukarela pada perusahaan yang terdaftar di Palestina. Penelitian tersebut menggunakan 48 sampel perusahaan pada tahun 2011 dan 35 sampel perusahaan pada tahun 2007 yang terdaftar di Bursa Efek Palestina (PEX). Variabel independen yang di uji adalah dewan non-eksekutif, komite audit, ukuran dewan, jumlah pemegang saham, aktivitas dewan.

Alhazaimh *et al.* (2013) meneliti tentang dampak tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan pada pengungkapan sukarela pada perusahaan yang

terdaftar di Jordania. Penelitian tersebut menggunakan 72 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Amman pada tahun 2002-2011. Variabel independen yang diuji adalah komite audit, kompensasi dewan, aktivitas dewan, ukuran dewan, dewan non-eksekutif, perusahaan audit besar, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, kepemilikan *blockholder*, jumlah pemegang saham.

Lan *et al.* (2013) meneliti tentang fitur-fitur dari pengungkapan sukarela pada perusahaan di pasar saham China . Penelitian tersebut menggunakan 1066 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Shanghai dan Shenzhen pada tahun 2006. Variabel independen yang di uji adalah ukuran perusahaan, *leverage*, aset di tempat, likuiditas, *return on equity* (ROE), tipe auditor, penyebaran kepemilikan, dewan non-eksekutif, kepemilikan negara, perantara dan hukum lingkungan.

Janadi *et al.* (2013) meneliti tentang tata kelola perusahaan dan pengungkapan sukarela pada perusahaan yang terdaftar di Arab Saudi. Penelitian tersebut menggunakan 87 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Arab Saudi pada tahun 2006-2007. Variabel independen yang di uji adalah dewan non-eksekutif, anggota dewan sekeluarga, ukuran dewan, independen komite audit, pemisahan *CEO* dan posisi *Chairman*, kualitas audit, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah. Adapun variabel kontrol yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, sektor keuangan, sektor industri, dan profitabilitas.

Barros (2013) meneliti tentang tata kelola perusahaan dan pengungkapan sukarela pada perusahaan yang terdaftar di Perancis. Penelitian tersebut menggunakan 206 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Perancis pada tahun 2006-2009. Variabel independen yang diuji adalah kepemilikan manajerial, independen direksi, rapat direksi, rata-rata direksi, komite audit, frekuensi rapat

direksi, kehadiran rapat direksi, kualitas audit. Ada juga variabel kontrol yang digunakan antara lain profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan.

Damagum dan Chima (2013) meneliti tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap informasi pengungkapan sukarela pada perusahaan yang terdaftar di Nigeria. Penelitian tersebut menggunakan 35 sampel perusahaan yang terdaftar di Nigeria pada tahun 1999-2009 total 385 laporan tahunan. Variabel independen yang di uji adalah ukuran direksi, proporsi non-eksekutif direksi, kepemilikan direksi.

Sehar, Tufail dan Bilal (2013) meneliti tentang pengungkapan sukarela terhadap laporan tahunan pada perusahaan yang terdaftar di Pakistan. Penelitian tersebut menggunakan 372 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Karachi pada tahun 2012. Variabel independen yang digunakan ukuran perusahaan, ukuran audit, umur perusahaan, *leverage*, profitabilitas.

Sartawi *et al.* (2014) meneliti tentang komposisi dewan, karakteristik dewan dan pengungkapan sukarela pada perusahaan di Jordania. Penelitian tersebut menggunakan 103 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Amman pada tahun 2012. Variabel independen yang diuji adalah ukuran dewan, direktur non-eksekutif, konsentrasi pemegang saham, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, umur dewan, jenis kelamin dewan.

Ali (2014) meneliti tentang kepemilikan struktur dan pengungkapan sukarela pada perusahaan di Turnisia. Penelitian tersebut menggunakan 29 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Turnisia pada tahun 2009-2011. Variabel independen yang diuji adalah kepemilikan *blockholder*, kepemilikan keluarga,

kepemilikan institusional. Adapun variabel kontrol yang digunakan antara lain ukuran perusahaan, ROE, rasio gearing.

Madia, Ishak dan Manaf (2014) meneliti tentang pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan di Malaysia. Penelitian tersebut menggunakan 146 sampel perusahaan yang terdaftar di Malaysia pada tahun 2009. Variabel independen yang diuji adalah komite audit independen, komite audit keahlian keuangan, frekuensi pertemuan komite audit, ukuran komite audit, komite audit anggota direksi.

Mardini (2015) meneliti tentang tata kelola perusahaan dan pengungkapan di Jordania. Penelitian tersebut menggunakan 15 sampel bank yang terdaftar di ASE pada tahun 2007-2010. Variabel independen yang di uji adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, konsentrasi kepemilikan, independen direksi, ukuran direksi, chairman duality, perusahaan audit, jumlah cabang.

Negara yang sama tetapi merupakan penelitian yang diteliti oleh Albawwat dan Basah (2015) tentang tata kelola perusahaan dan pengungkapan sukarela pada perusahaan di Jordania. Penelitian tersebut menggunakan 73 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Amman pada tahun 2009-2013. Variabel independen yang diuji adalah komite audit, kompensasi dewan, frekuensi rapat dewan direksi, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan audit, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, jumlah pemegang saham, kepemilikan *blockholder*.

2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela

2.4.1 Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan sukarela

Ukuran dewan direksi merupakan banyak atau sedikitnya para organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan

kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Akhtaruddin *et al.* (2009) menyatakan ukuran direksi dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela karena tingkat pengungkapan adalah keputusan strategis yang dibuat dewan direksi. Dewan direksi merupakan badan manajemen tingkat atas, dewan direksi merumuskan kebijakan dan strategi yang harus diikuti oleh para manajer. Ini telah menunjukkan bahwa dengan jumlah besar dewan direksi yang ada dapat mengurangi kemungkinan asimetri informasi. Birnbaum (1984) menunjukkan bahwa ketidakpastian dan kurangnya informasi dalam suatu pengungkapan dapat diminimalisasikan oleh dewan direksi dengan jumlah yang banyak. Lebih banyak dewan direksi yang lebih berpengalaman dan berkeahlian akan membuat kebutuhan keterbukaan informasi lebih tinggi.

Penelitian yang dilakukan Akhtaruddin *et al.* (2009) mengemukakan hasil bahwa ukuran direksi memiliki hubungan signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Rouf (2010), Janadi *et al.* (2013), Sweiti dan Attayah (2013), Sartawi *et al.* (2014). Hasil lain seperti penelitian Dhouibi dan Mamoghli (2013) menunjukkan ukuran dewan direksi berhubungan signifikan negatif terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Htay (2012). Penelitian yang dilakukan Albawwat dan Basah (2015) mendapatkan hasil ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan pada pengungkapan sukarela. Hasil penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan Alhazaimah *et al.* (2013), Fathi (2013), Saha dan Akter (2013), Uyar *et al.* (2013), Ramadhan (2014).

2.4.2 Pengaruh non-eksekutif direksi terhadap pengungkapan sukarela

Non-eksekutif direksi adalah anggota dewan yang dipandang sebagai mekanisme kontrol ketika mereka melakukan fungsi pemantauan independen (Sartawi *et al.*, 2014). Penyusunan laporan tahunan yang berisi informasi sukarela, jatuh dalam kebijaksanaan dewan sehingga dewan mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela (Chakroun & Matoussi, 2012).

Teori agensi mengasumsikan kehadiran pengelola luar mengarah ke pengurangan masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham berkat independensi dan objektivitas mereka. Para direktur non-eksekutif independen dianggap sebagai alat untuk mengendalikan perilaku pemimpin. Mereka terlihat menjadi alat kontrol internal dan kehadiran mereka membantu membuat sistem perusahaan kelola yang lebih efektif (Chakroun & Matoussi, 2012).

Proporsi yang lebih tinggi dari direktur non-eksekutif di perusahaan akan menghasilkan pengungkapan yang lebih tinggi dari aspek material perusahaan dalam rangka meningkatkan transparansi ketika dewan independen mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut (Htay, 2012). Dewan yang sebagian besar terdiri dari direktur non-eksekutif memberikan pengungkapan yang lebih sukarela untuk melindungi reputasi mereka sebagai ahli dalam kontrol keputusan. Konsisten dengan anggota dewan pengawas mungkin mendorong pengungkapan sukarela tambahan untuk melindungi pemegang saham dari direksi dalam yang mungkin memberikan informasi yang menyesatkan dan untuk mengurangi eksposur mereka terhadap risiko litigasi dari manajemen yang buruk (Braam & Borghans, 2014).

Beberapa penelitian menemukan pengaruh signifikan positif antara non-eksekutif direksi dengan pengungkapan sukarela, yakni Barako (2007), Akhtaruddin *et al.* (2009), Rouf (2011), Chakroun dan Matoussi (2012), Htay (2012), Janadi *et al.* (2013), Lan *et al.* (2013), Sweiti dan Attayah (2013), Uyar *et al.* (2013), Nguyen (2014), Ramadhan (2014), Sartawi *et al.* (2014). Penelitian yang dilakukan Khodadadi *et al.* (2010), Alhazaimah *et al.* (2013), Dhouibi dan Mamoghli (2013) menemukan non-eksekutif direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

2.4.3 Pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan sukarela

Kepemilikan asing adalah persentase saham yang dimiliki oleh orang asing dari seluruh saham perusahaan (Kangarlouei, Birjandi & Motavassel, 2013).

Tingkat pengungkapan sukarela dan tingkat informasi keuangan yang tinggi bisa mencerminkan tingkat transparansi yang lebih tinggi. Pemilik asing akan membutuhkan lebih banyak informasi pengungkapan, karena pengungkapan digunakan sebagai sarana untuk memantau tindakan manajemen oleh pemilik asing (Haniffa dan Cooke, 2002).

Dulacha (2007) juga menyatakan perusahaan yang merupakan anak perusahaan multinasional, dan kehadiran orang asing secara signifikan dapat mempengaruhi pendekatan mereka untuk pelaporan keuangan perusahaan untuk memenuhi persyaratan pelaporan asing. Mengingat geografis pemisahan pemilik dan manajemen, perusahaan manajemen mungkin cenderung untuk secara sukarela menyediakan informasi lebih dalam laporan tahunan. Hal tersebut menyebabkan kepemilikan asing dapat menjadi penentu yang signifikan dari

tingkat pengungkapan perusahaan sehingga semakin banyak kepemilikan asing akan semakin bagus pengungkapan sukarela suatu perusahaan.

Penelitian yang dilakukan dilakukan Dulacha (2007), Alhazaimeh *et al.* (2013), Dhouibi dan Mamoghli (2013), Sartawi *et al.* (2014), Hieu dan Lan (2015), Qu, Leung dan Cooper (2015) mengemukakan hasil penelitian bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela. Berbeda dengan hasil penelitian Albawwat dan Basah (2015) yang menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara kepemilikan asing dan pengungkapan sukarela.

2.4.4 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela

Kepemilikan institusional merupakan bentuk kepemilikan saham suatu perusahaan oleh satu atau lebih institusi (lembaga). Institusi atau lembaga di sini dapat berupa bank, perusahaan investasi, ataupun perusahaan lainnya. Sejumlah kelompok yang memiliki pengaruh pada tata kelola perusahaan di antaranya, pemegang saham, investor terutama institusi, memainkan peran penting dalam perusahaan (Khodadadi *et al.*, 2010). Investor institusional umumnya memegang sebagian besar saham di perusahaan besar. Luasnya properti mereka memungkinkan mereka untuk menjadi pemain yang paling penting dalam struktur tata kelola perusahaan (Rouf, 2011).

Kepemilikan saham yang besar, investor institusi dapat mengungkapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang kuat yang bisa melakukan pengawasan atas pengelolaan perusahaan. Mereka juga dapat jauh mempengaruhi manajemen perusahaan atau mengkoordinasikan kepentingan kelompok pemegang saham

(Khodadadi *et al.*, 2010). Investor institusional memiliki insentif yang kuat untuk memantau praktik pengungkapan perusahaan, sehingga manajer mungkin akan sukarela mengungkapkan informasi untuk memenuhi harapan pemegang saham besar (Chakroun & Matoussi, 2012).

Investor yang dapat mempengaruhi manajer, akan menyebabkan manajer cenderung akan sukarela mengungkapkan lebih untuk meningkatkan kualitas informasi yang diungkapkan. Para investor institusional dengan mudah mendapatkan informasi perusahaan dan mereka juga memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk memanfaatkannya (Fathi, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Chakroun dan Matoussi (2012) menemukan hasil penelitian bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Dulacha (2007), Khodadadi *et al.* (2010), Salteh *et al.* (2011), Saha dan Akter (2013), Uyar *et al.* (2013), Ali (2014), Nguyen (2014), Charumathi dan Ramesh (2015), Nik, Rahimi, dan Gholami (2015). Berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan Fathi (2013), Saha dan Akter (2013), Sartawi *et al.* (2014) yang tidak menemukan hubungan signifikan antara kepemilikan institusional dan pengungkapan sukarela.

2.4.5 Pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan sukarela

Kepemilikan pemerintah adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh pemerintahan suatu negara. Eng dan Mak (2003) berpendapat bahwa biaya agensi lebih tinggi dalam perusahaan yang terkait dengan pemerintahan, karena tujuan yang bertentangan antara tujuan keuntungan murni dari perusahaan komersial dan tujuan yang berkaitan dengan kepentingan bangsa. Tekanan

pemerintah dan publik yang kuat membuat perusahaan harus lebih transparan dalam pengelolaannya. Perusahaan menggunakan laporan tahunan sebagai salah satu media pelaporan pertanggungjawaban manajemen mereka sebagaimana diatur dalam UU PT No. 40 Tahun 2007. Menurut Eng dan Mak (2003) semakin besar kepemilikan pemerintah maka perusahaan cenderung melakukan pengungkapan yang lebih tinggi.

Dhouibi dan Mamoghli (2013) menyatakan pemegang saham negara fokus pada kekayaan distribusi dan menjaga ketertiban sosial sehingga meningkatkan nilai pemegang saham bukan tujuan utama dari kepemilikan negara. Faktor ini melemahkan tekanan untuk pengungkapan sukarela yang diarahkan di masyarakat sehingga mungkin kurangnya pengungkapan di perusahaan-perusahaan yang proporsi kepemilikan pemerintah lebih tinggi. Semakin kecil kepemilikan saham pemerintah akan semakin bagus pengungkapan sukarela suatu perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alhazaimah *et al.* (2013), Albawwat dan Basah (2015) mengemukakan bahwa kepemilikan pemerintah secara signifikan positif mempengaruhi pengungkapan sukarela. Hasil penelitian oleh Janadi *et al.* (2013) mengemukakan bahwa kepemilikan pemerintah secara signifikan negatif mempengaruhi pengungkapan sukarela. Hasil penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan Dhouibi dan Mamoghli (2013), Nguyen (2014). Berbeda dari hasil penelitian di atas, penelitian yang dilakukan Yuen *et al.* (2009), Juhmani (2013), Hieu dan Lan (2015) tidak menemukan hubungan signifikan antara kepemilikan pemerintah dan pengungkapan sukarela.

2.4.6 Pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan sukarela

Salah satu komite penunjang yang dibentuk oleh dewan komisaris adalah komite audit. Tugas komite audit mencakup pemeriksaan dan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Komite audit juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan obyektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap adanya pengendalian internal yang lebih baik. Komite audit juga merupakan salah satu mekanisme pemantauan yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas pengungkapan (Mujiono & Nany, 2010).

Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-29/PM/2004, Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan Komite Audit, setiap emiten atau perusahaan publik berkewajiban untuk memiliki komite audit dan pedoman kerja komite audit (*audit committee charter*). Adanya komite audit disuatu perusahaan maka akan meningkatkan tingkat kepercayaan para pengguna laporan keuangan atas laporan yang diberikan oleh perusahaan dan juga lebih akurat informasi-informasi dalam laporan keuangan tersebut. Semakin banyak komite audit disuatu perusahaan maka semakin akurat terhadap data laporan keuangan yang diungkapkan karena akan meminimalisasikan asimetri informasi.

Penelitian yang dilakukan Mujiono dan Nany (2010) mendapatkan hasil komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan Akhtaruddin *et al.* (2009), Alhazaimh *et al.* (2013), Saha dan Akter (2013), Ramadhan (2014), Albawwat dan Basah (2015). Penelitian yang dilakukan Barako (2007), Rouf (2010), Barros (2013), Sweiti dan Attayah (2013) mendapatkan hasil bahwa

komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela. Hasil lain seperti penelitian yang dilakukan oleh Yuen *et al.* (2009) yang menemukan hubungan signifikan negatif antara ukuran komite audit dan pengungkapan sukarela.

2.4.7 Pengaruh komite audit independen terhadap pengungkapan sukarela

Komite audit independen merupakan anggota komite audit yang berasal dari luar perusahaan atau anggota dewan komisaris yang tidak melakukan tugas-tugas eksekutif dan terdiri paling sedikit tiga anggota dan mayoritas harus independen (Mujiono & Nany, 2010). Tujuan utama dari komite audit yaitu untuk memastikan kualitas dari proses pelaporan keuangan dan memantau penerapan aturan dan peraturan yang mengatur kegiatan keuangan dan non-keuangan.

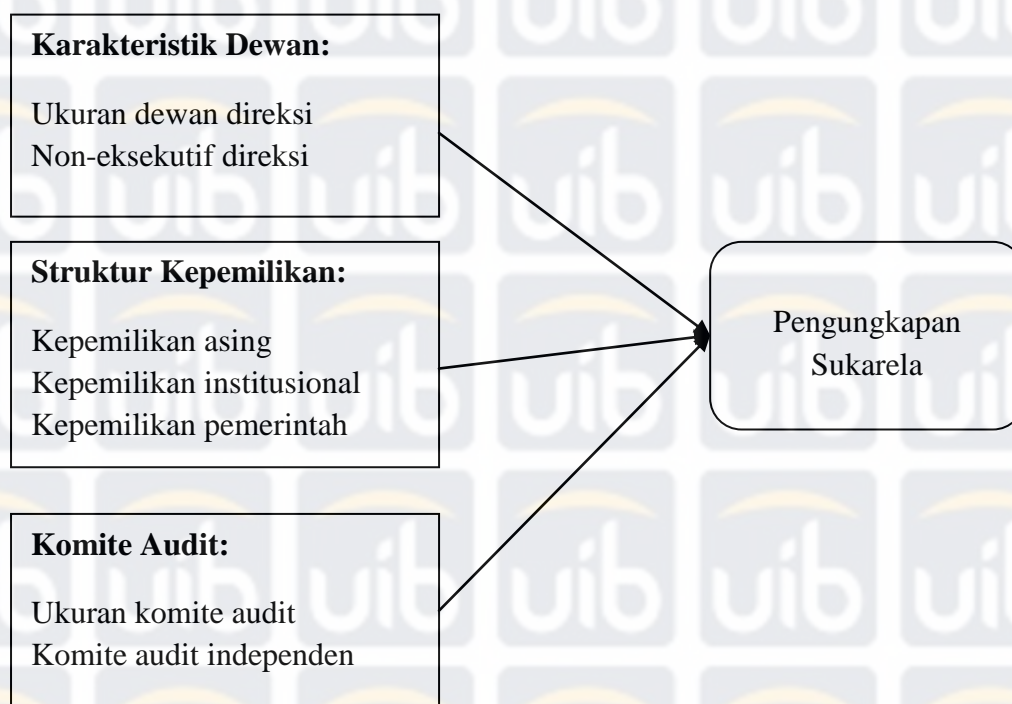
Komite audit independen tidak memiliki hubungan ekonomi atau personal dengan manajemen sehingga mereka lebih mungkin untuk bekerja secara independen dan obyektif dari manajemen. Komite audit independen memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengontrol dan mengurangi kesempatan manajemen untuk menahan informasi untuk keuntungan mereka sendiri (Madi, 2014).

Wajar untuk berpendapat bahwa pengawasan yang efektif oleh komite audit independen diduga lebih memotivasi manajemen untuk memberikan informasi yang benar, akurat, dan tambahan informasi dalam laporan perusahaan. Hal ini menyebabkan semakin banyak komite audit independen akan semakin baik pengungkapan sukarela suatu perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Janadi *et al.* (2013) dan Barros (2013) mengemukakan bahwa komite audit

independen tidak mempengaruhi signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Trisakti (2012), Oba, Ibikunle, dan Damagum (2013), Madi (2014), Othman, Ishak, Arif, dan Aris (2014).

2.5 Model Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan sukarela atau yang secara umum dikenal dengan *voluntary disclosure*. Variabel independen yang diuji adalah ukuran dewan direksi, non-eksekutif direksi, kepemilikan asing, kepemilikan institutional, kepemilikan pemerintah, ukuran komite audit, dan komite audit independen. Model penelitian dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2 Model Penelitian, sumber: Data diolah, 2017.

2.6 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka model di atas maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H₁: Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela.

H₂: Non-eksekutif direksi berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela.

H₃: Kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela.

H₄: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela.

H₅: Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela.

H₆: Ukuran komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela.

H₇: Komite audit independen berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela.